

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR KARYA KURNIAUTAMA
PERIODE TAHUN 2017

Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan penerapan tata kelola pada Bank harus berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan penerapan tata kelola.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Bank membuat Laporan Penerapan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Laporan penerapan tata kelola ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertama membahas transparansi penerapan tata kelola BPR dan kedua membahas mengenai kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

Transparansi penerapan tata kelola akan mengungkap 12 (dua belas) aspek prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite (apabila ada), antara lain :
 - Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite
 - Program kerja komite dan realisasinya
2. Kepemilikan saham Direksi
3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS
7. Rasio gaji tertinggi dan terendah
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)
10. Permasalahan hukum
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
12. Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik selama periode pelaporan

Untuk mengungkap seluruh aspek transparansi penerapan tata kelola secara rinci sebagai syarat utama dalam pelaporan penerapan tata kelola maka Bank akan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas untuk setiap aspek transparansi sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Pengungkapan penerapan tata kelola mengenai :

a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi pada tahun 2017 adalah 2 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Anggota Direksi

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Dr. Syukur Tulus Ikhlas Sianipar.SE.MM
2	Direktur	Retno Wulan Ambarsari.

Semua anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

b. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah 2 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Charles Pasaribu.SH
2	Komisaris	Sri Pamoso Rahardjo Salim,SH

Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dan telah memenuhi persyaratan serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*)

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai langkah awal untuk memulai penerapan tata kelola, dan akan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala serta memberi nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dapat dipastikan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sesuai diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah menindaklanjuti sebagian temuan audit dan rekomendasi dari pihak pengawas internal maupun eksternal.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan intern bank

2. Kepemilikan saham anggota Direksi

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lainnya, bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang mempunyai saham di BPR yang bersangkutan maupun di perusahaan lainnya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki		
			BPR yg bersangkutan	Bank Lainnya	Perusahaan Lainnya
1	Dr. Syukur Tulus Ikhlas Sianipar. SE.MM	Direktur Utama	Rp. 400.000.000,- (16 % dari modal disetor)		

3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

No	Jabatan	Nama	Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga
1	Direktur Utama	Dr.Syukur Tulus Ikhlas Sianipar,SE.MM		• Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali • Hubungan keluarga dengan Komisaris Utama

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lainnya, bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mempunyai saham di BPR yang bersangkutan maupun di perusahaan lainnya sebagaimana disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang Dimiliki		
			BPR yg bersangkutan	Bank Lainnya	Perusahaan Lainnya
1	Charles Pasaribu.SH	Komisaris Utama	Tidak ada	Rp. 120.000.000,- (6% dari modal disetor) PT. BPR Berfasi Raharja Bogor	

5. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

No	Jabatan	Nama	Hubungan Keuangan	Hubungan Keluarga
1	Komisaris Utama	Charles Pasaribu.SH	Tidak ada	• Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali • Hubungan keluarga dengan Direktur Utama

6. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 :

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Keseluruhan Gaji	137.400.000,-	366.750.000,-
Tunjangan	32.976.000,-	46.924.000,-
Tantiem	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0
Remunerasi Berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggungjawab dan risiko	0	19.756.000,-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang	0	0

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah :

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diungkap sebagai berikut :

No	Parameter Perbandingan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,98 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,87 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,41 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,01 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,73 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji diatas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai per bulan dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana.

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, frekuensi rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis Bank. Berdasarkan notulen rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa

pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait. Mengenai topik atau materi dalam bidang operasional tentang pencapaian realisasi terhadap rencana bisnis, memaksimalkan penagihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penerapan prinsip kehati-hatian, dan evaluasi atas penerapan program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

9. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, dan pegawai tidak tetap yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya paling sedikit meliputi,

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Dalam 1 tahun							
	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan	Th. Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2017, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

10. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Berdasarkan data tabel diatas dapat disampaikan bahwa selama periode tahun 2017 jumlah permasalahan hukum yang terjadi pada bank adalah nihil.

11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, disampaikan sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

No	Nama Kegiatan	Penerima Dana	Nilai Transaksi
1.	Dana THR untuk pihak keamanan & kebersihan Ruko	Sahri Supriadi	Rp. 280.000,-
2.	Dana Sponsorship kegiatan sekolah "Trinitas"	Ign. Slamet Widodo	Rp. 1.000.000,-

II. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (sebelum penerapan Manajemen Risiko)

A. Nilai Komposit dan Predikatnya

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.43	0.31	-	0.33	0.25	0.24	0.06	-	0.18	0.16	0.15	2.12
Predikat Komposit	Baik											

B. Peringkat masing-masing faktor

No	Keterangan Faktor	Predikat Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Baik
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Baik
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	Tidak dinilai (karena BPR bobot faktor B)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Cukup Baik
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Baik
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem	Tidak dinilai (manajemen risiko belum diterapkan)
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Baik

C. Kesimpulan (Kelebihan & Kelemahan)

1. Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam batas kewajaran dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite
Belum melaksanakan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite karena modal inti masih dibawah Rp. 80 Milyar
4. Penanganan Benturan Kepentingan
BPR belum memiliki ketentuan maupun SPO mengenai benturan kepentingan, dan selama ini masih diatasi melalui musyawarah kepada pihak-pihak terkait
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk menjalankan fungsi pengendalian/pengawasan intern dan masih dalam proses pembelajaran dan penyempurnaan
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penerapan fungsi audit ekstern sudah berjalan baik
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Penerapannya belum sepenuhnya berjalan, dan masih dalam tahap pembelajaran dan penyempurnaan
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Selama Tahun 2017 telah berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran BMPK, selain itu Bank telah mempunyai ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank. (PKPB)
10. Rencana Bisnis Bank
Pembuatan dan pelaksanaan rencana bisnis telah berjalan cukup baik dengan mempertimbangkan analisa SWOT yang ada.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Transparansi kondisi keuangan telah berjalan cukup baik, dengan adanya pelaporan keuangan publikasi yang diketahui oleh pihak umum karena

telah dipublikasikan melalui media cetak.

Demikian Laporan Penerapana Tata Kelola BPR Karya Kurniautama untuk periode penilaian per 31 Desember 2017 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang telah mengungkapkan aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kondisi sebenarnya pada bank. Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada stakeholders sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran Bank.

Cikarang, 24 April 2018
PT. BPR Karya Kurniautama

Charles Pasaribu, SH.MH
Komisaris Utama

Retno Wulan Ambarsari
Direktur